

**FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG DALAM PROGRAM BEDAH
RUMAH DI DESA TUNAS HARAPAN KECAMATAN GUNUNG
MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Oleh :

Reza Akhyar
NPM : 1903100024

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kosentrasi Administrasi Pembangunan



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **REZA AKHYAR**
N P M : 1903100024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 21 September 2023
Waktu : 08.15 s.d Selesai


TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., P.hD** (.....)
PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP** (.....)
PENGUJI III : **AFFAN AL QUDDUS, S.Sos., M.Si** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **REZA AKHYAR**
N P M : 1903100024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA TUNAS HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Medan, 18 September 2023

PEMBIMBING


AFFAN AL QUDDUS, S.Sos., M.Si

NIDN. 9990428081

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP

NIDN. 0122118801

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

NIDN. 0030017402

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya **REZA AKHYAR**, NPM. 1903100024, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Juni 2024

Yang menyatakan



REZA AKHYAR

ABSTRAK

Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Reza Akhvar
NPM : 1903100024

. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat atau penduduk yang ada di suatu wilayah. Kesejahteraan tidak hanya bisa dilihat dari sisi ekonomi masyarakat akan tetapi harus di lihat juga dari sisi kesejahteraan rumah masyarakat yang tidak layak huni. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, mengenai Program bedah rumah, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil**” Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Program bedah rumah/Perumahan Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah pembangunan rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Program Bedah Rumah bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun rumah layak huni untuk mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci ; Fungsi Pengawasan, Bedah Rumah

ABSTRACT

Function of Direct Supervision in the House Renovation Program in Tunas Harapan Village, Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency

Reza Akhyar
NPM: 1903100024

The government has a very important role in serving and improving the welfare of the community or population in an area. Welfare can not only be seen from the economic perspective of the community, but must also be seen from the perspective of the welfare of people's homes that are uninhabitable. Based on the problems described above, regarding the house renovation program, the researcher is interested in taking the title "The Function of Direct Supervision in the House Renovation Program in Tunas Harapan Village, Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency." The formulation of the problem in this research is as follows: What is the Function of Direct Supervision in House Renovation Program in Tunas Harapan Village, Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency.

The method used in this research is a qualitative description method. The qualitative method is a research method used to examine the conditions of natural objects, (as opposed to experiments) where the researcher is the key instrument, sampling of data sources is carried out purposively and snowballing, the collection technique is triangulation (combination), data analysis is inductive or qualitative, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalization.

Based on the results of the research and discussion, the following conclusions can be drawn: The house renovation/housing program in Tunas Harapan Village, Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency is the construction of houses or housing built on the initiative and efforts of the community, either individually or in groups, which includes repairs , restoration/expansion or construction of new houses and their surroundings. The House Renovation Program aims to help Low Income Communities (MBR) in building livable houses to improve the welfare of the community.

Keywords ; Supervision Function, House Surgery

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Alm. Saiful Amri dan Ibunda saya Suryati yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Rudianto selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP, selaku Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Affan Al-Quddus, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2023
Penulis

REZA AKHYAR
NPM. 1903100024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS.....	9
2.1. Uraian Teoritis	9
2.2. Pengertian Pengawasan.....	12
2.3.Pengertoian Pengawasan Langsung.....	17
2.4 Program Bantuan Bedah Rumah Layak Huni.....	21
2.5 Pemerintah Desa / Penyelenggara.....	26
BAB III METODEDE.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2. Kerangka Konsep.....	32
3.3. Defenisi Konnsep.....	33
3.4. Katagorisasi.....	35
3.5. Narasumber	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	41
BAB IV HASII DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Deskripsi Hasil Wawancara	42
4.2. Penyajian Data.....	42
4.3. Pembahasan.....	57

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PEMDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu bangsa yang sedang berkembang dan giat-giatnya mengejar ketertinggalan disegala bidang. Salah satu upaya yang di lakukan salah satunya dibagian infrastruktur, yang dimana bertujuan agar supaya masyarakat merasakan hidup yang sejahtera dan mendapatkan hidup yang layak. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat atau penduduk yang ada di suatu wilayah. Kesejahteraan tidak hanya bisa dilihat dari sisi ekonomi masyarakat akan tetapi harus di lihat juga dari sisi kesejahteraan rumah masyarakat yang tidak layak huni.

Menurut Maslow dalam Suparno, (Abu Ahmad. 2023 :344) menyebutkan bahwa sesudah manusia terpenuhi kebutuhan jasmaninya, yaitu sandang, pangan, dan kesehatan, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya.

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, untuk memajukan kesejahteraan umum dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan kemakmuran lahiriah dan kepuasan

batiniah. Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan jumlah rumah tidak layak pada tahun 2019-2021 di seluruh Indonesia masih sebanyak 2,51 juta unit. Melihat jumlah rumah tidak layak huni yang tergolong cukup besar ini terlihat bahwa masih banyaknya masyarakat miskin yang membangun rumah secara swadaya. Melihat hal seperti ini menunjukkan rentannya permasalahan sosial yang muncul di masyarakat apabila pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni ini tidak dapat diatasi

Seiring dengan berjalannya kebijakan otonomi daerah, kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di daerah-daerah dapat mengelola sendiri penyelenggaraan pembangunan yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah atau Wilayah Pemerintahan masing-masing. Akan tetapi kenyataannya pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta yang menentukan yang berhak menerima Program Bedah Rumah ini masih di perhadapkan dengan program yang dapat dikatakan belum Efektif dan Efisien serta kualitas dari program ini masih bisa dikatakan belum baik.

Dalam meningkatkan kualitas Program Bedah Rumah ini adalah merupakan salah satu yang sangat penting untuk diperhatikan, hal ini terjadi di karenakan pemerintah dituntut untuk melaksanakan Program Bedah Rumah ini tepat sasaran yaitu sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang

telah di tentukan agar program bedah rumah ini bisa berjalan secara Efektif dan Efisien akan tetapi jika dilihat jalannya Program Bedah Rumah ini masih tidak memiliki perubahan.

Perlu di ketahui bahwa Program Bedah Rumah ini sendiri merupakan Alokasi Anggaran dari Dana Desa yang digunakan untuk infrastruktur yang di dalamnya yaitu untuk Pembangunan Rumah Yang Tidak Layak Huni melalui Program Bedah Rumah, dengan di Alokasikan Dana Desa ini untuk rumah masyarakat yang layak huni Pemerintah mengharapkan akan terjadinya pemerataan pembangunan yang ada dimasyarakat.

Adapun juga tujuan dari Program Bedah Rumah ini tentu agar supaya membuat masyarakat yang kurang mampu, bisa mendapatkan kesejahteraan melalui Program Bedah Rumah ini, dimana masyarakat yang kurang mampu bisa memperoleh hidup yang layak dan nyaman. Dari proses pencarian masalah, banyak masyarakat yang mengaku bahwa program ini harus distabilkan agar supaya program ini tepat dengan sasaran dan, ketidak stabilan Program Bedah Rumah ini terjadi dikarenakan pemerintah yang adalah pengambilan keputusan mengambil keputusan secara sepihak tanpa mengadakan komunikasi atau mendengar keluhan masyarakat dengan luas, dengan alasan pemerataan pembangunan.

Program Bedah Rumah perlu memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan maka program ini akan tetap sesuai dengan sasaran dan berjalan dengan

baik tanpa perdebatan yang berarti, jika di lihat dari definisi Rumah Layak Huni yaitu: Bahan Lantai berupa Tanah atau Kayu kelas IV, bahan dinding berupa Bilik Bambu/Kayu/Rotan atau Kelas Kayu IV, tidak atau kurang mempunyai Ventilasi dan ,Bahan Atap berupa Daun atau Genteng Plentong yang sudah Rapuh, Rusak Berat dan/atau, Rusak Sedang dan Luas Tanah Tidak Mencukupi Standar Minimal per Anggota Keluarga.

Berdasarkan Keputusan Kementrian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat No 17/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah dimana beberapa hal yang harus diperhatikan: Ketentuan Umum, Bentuk Bantuan, Jenis dan Besaran, Syarat Penerima Bantuan, Penyelenggaraan Bantuan, Penetapan Calon Penerima Bantuan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan. R-RTLH adalah program yang diperuntukan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni.

Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, dalam bidang perumahan swadaya pemerintah melalui Menteri PUPR menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat No. 33/PRTM/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) dijalankan sejak tahun 2019 oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil jumlah rumah tidak layak huni masih tergolong cukup besar. Melihat data di atas, ini menunjukkan bahwa jumlah rumah tidak layak huni Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil perlu adanya penyelesaian melalui bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni agar tidak lagi adanya masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni, alasan lain Kecamatan Kualuh Leidong melaksanakan Program R-RTLH adalah sebagai upaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan angka kekumuhan. Dimana untuk jumlah rumah tidak layak huni hingga akhir tahun 2019-2021 yang terbesar Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil mencapai 47,29% dan persentase kawasan kumuh berada pada kisaran 2,19%.10 Sedangkan jumlah luas permukiman kumuh di Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2019-2021 sekitar 340,992 km. (data oleh Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil).

Meskipun sudah melalui proses yang panjang, ternyata program tersebut dinilai masih belum maksimal. Sebagaimana tujuan dari Program

Bedah Rumah adalah upaya pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun rumah layak huni untuk mensejahterakan masyarakat. Namun disisi lain ternyata program ini berjalan dengan optimal serta masih ditemukan berbagai penyimpangan terutama pada kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada kesan bahwa pembangunan rumah tersebut hanya sekedar menjalankan program semata tanpa melihat pentingnya kualitas bangunan sesuai dengan persyaratan pembangunan rumah dalam program bedah rumah yang layak huni. Hal ini tentunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan program bedah rumah tersebut yang seharusnya dijalankan sesuai dengan standar pengawasan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah pihak instansi terkait yakni Dinas Perumahan *Rakyat dan Kawasan* Permukiman Aceh Singkil

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, mengenai Program bedah rumah, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diharapkan dari kajian analisi penelitian ini yakni : “Untuk mengetahui sejauh Bagaimanakah Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai kaitan penerapan Standar Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dalam kaitanya dengan Program Bedah Rumah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan

sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEPROTIS

2.1. Uraian Teoritis

1. Pengertian Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan hal diatas maka retribusi mempunyai beberapa fungsi (Waluyo dan Wirawan 2002: 8), yaitu:

- 1) Fungsi anggaran ; Yaitu sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik.

- 2) Fungsi mengatur ; Yaitu alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pemerintah, berfungsi mengatur perekonomian dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tepat sasaran.
- 3) Fungsi stabilitas ; Yaitu sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu daerah, dapat digunakan untuk mengatasi ketidak stabilan ekonomi melalui penentuan jumlah tariff.
- 4) Fungsi redistribusi pendapatan ; Yaitu digunakan untuk membiayai dan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat atau bisa juga disebut sebagai fungsi untuk pemerataan pendapatan.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar. Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan.

Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada pakem yang berlaku. Brantas (2006: 188) Fungsi pengawasan (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan

sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik- baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Menurut Danamik Dalam (Ihyaul Ulum, 2009: 129) salah satu aspek dari kegiatan pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta dengan pemberian pendapat atau apabila dipandang perlu rekomendasi.

Secara Filosofis dikatakan bahwa pengawasan sangat karena manusia pada dasarnya mempunyai sifat salah atau khilaf, sehingga manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan untuk mencari kesalahannya kemudian menghukumnya tetapi untuk mendidik dan membimbingnya. Husnaini (2001: 400) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyelewengan , pemborosan dan hambatan.
- b) Mencegah terulang kembalinya kesalahan penyelewengan , pemborosan dan hambatan
- c) Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
- d) Meningkatkan kinerja perusahaan.

Selanjutnya Fayol dalam Harahap (2011: 10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa semua terjadi sesuai dengan rencana

yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Tujuan dari pengawasan menurut George Terry (2009) ialah supaya dewan manajemen mendapatkan gambaran keseimbangan kerja diantara unit-unit secara terpadu. Geogre juga mengatakan bahwa pengawasan hanya dapat dilakukan secara efektif apabila didukung oleh perencanaan dan kebijaksanaan.

Manullang (2001: 172) menyebutkan tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan utama pengawasan untuk memahamai apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

2.2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah upaya pemantauan secara terus menerus untuk memahami bidang-bidang tertentu dari perencanaan yang sedang dijalankan. Pengawasan yang baik tentunya akan sekaligus berfungsi sebagai evaluasi dari rencana yang dikerjakan, karena pada dasarnya pengawasan akan menghasilkan suatu kesimpulan akhir dari perencanaan yang dikerjakan. Dengan demikian, tentunya pengawasan yang sekaligus menghasilkan

kesimpulan yang dapat dijadikan evaluasi bisa menghemat sumber daya yang dimiliki, karena tidak perlu mengulang proses pengerjaan.

Pengawasan memiliki dua tujuan, yaitu memastikan pelaksanaan tidak menyimpang dari perencanaan yang dibuat dan membangun sistem pengawasan dini (early warning system) sebagai bagian penting untuk memastikan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan rencana yang telah dibuat.

Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Sujanto, 2019 : 63). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan bila tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan.

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efesien) dan berhasil guna efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan sebagaimana diketahui bahwa masing-masing fungsi pimpinan berhubungan erat satu sama lain, yaitu: Merencanakan, mengorganisasikan, menyusun dan memberi perintah serta pengawasan. Semua ini merupakan prosedur atau urutan pelaksanaan dalam merealisasikan tujuan yang akan dicapai. Dari semua fungsi pimpinan, fungsi pengawasan merupakan salah satu kunci yang menentukan berhasil sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Fayol, Henry (2010 ; 22) mengatakan bahwa: “Control is consist in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrence. It operates in everything peoples, actions.” Kontrol terdiri atas memverifikasi apakah semua sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sesuai instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ada.

Stoner, James AF. & R. Edward Freeman (1996), mengistilahkan pengawasan sama dengan pengendalian manajemen adalah proses yang memastikan bahwa aktivitas actual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Terry, George R. (2012) mengemukakan bahwa: “Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan.” Kontrol adalah untuk menentukan apa yang ingin dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan langkah-langkah perbaikan, jika diperlukan, untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana.

Pengertian pengawasan menurut Heidjarachman dan Husnan (1998: 358) adalah sebagai berikut : “Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan atau penyesuaian kembali rencana yang telah dibuat.”

Di dalam bukunya, Saydam (2000:167) menjelaskan tentang macam-macam pengawasan yang dikenal dalam ilmu manajemen, walaupun sasaran

pengawasan tidak terjadi penyimpangan (deviasi) dalam pelaksanaan pekerjaan, tetapi dilihat dari siapa yang melakukan pengawasan itu, maka pengawasan dapat dibedakan atas:

- (a) Pengawasan fungsional. Pengawasan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat fungsional atau aparat pengawasan yang secara fungsional tugasnya memang mengawasi pelaksanaan tugas-tugas.
- (b) Pengawasan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat yang disampaikan baik secara lisan kepada aparat yang berkepentingan, maupun tertulis melalui media cetak, dan sebagainya.
- (c) Pengawasan melekat. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan. Pengawasan ini melekat pada jabatan yang dipangku oleh seorang pimpinan, sehingga pengawasan merupakan kewajiban yang bersifat mutlak, dan harus dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengawasan atau pengendalian harus ditegakkan pada saat perencanaan mandeg. Akan tetapi, pengawasan atau pengendalian itu merupakan suatu konsep yang lebih menyerap, konsep yang membantu para manajer memantau efektivitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan mereka mengambil tindakan perbaikan begitu dibutuhkan. Langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Agar dapat memahami perencanaan kiranya ilustrasi di bawah ini dapat memberikan penjelasan secara umum.

2.1. Fungsi Pengawasan

Menurut Arifin & Hadi W.43, *controlling* (pengawasan) juga disebut juga sebagai pengendalian, merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, fungsi ini bertujuan untuk memastikan penemuan dan penerapan aktivitas (termasuk cara dan peralatan yang digunakan) di lapangan sesuai dengan yang direncanakan.

Arifin & Hadi W. menambahkan, dalam fungsi *controlling* (pengawasan) ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah:

- 1) menentukan standar atau tolok ukur prestasi kerja;
- 2) mengukur hasil kerja dengan standar yang ada;
- 3) membandingkan prestasi dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan;
dan
- 4) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar atau tolok ukur.

Stoner, Freeman, dan Gilbert (2005) masih dalam bukunya Erni T. Sule (2005: 318) mengemukakan fungsi pengawasan sebagai *a systematic effort to set performance standars with planning objectives, to design information feedback systems, to compare actual performance with these predetermined standards, to determine whether there are any deviations and to measure their significance, and to take any action required to assure that all corporate objectives*. Artinya bahwa pengawasan adalah upaya sistematis

dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antar kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Adapun tujuan dari fungsi pengawasan yaitu :

1. Adaptasi Lingkungan. Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal.
2. Meminimumkan Kegagalan. Ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya, perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin.
3. Meminimumkan Biaya. Fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dalam meminimumkan kegagalan dalam produksi misalnya, akan dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
4. Antisipasi Kompleksitas Organisasi. Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.

2.3. Pengertian Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Dalam pengawasan langsung dapat dilakukan dengan peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Cara ini mengandung kelemahan, menimbulkan kesan kepada bawahan bahwa mereka diamati secara keras dan kuat sekali.

Menurut SP Siagian (2008: 115) menyatakan bahwa yang di maksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung, dapat berupa: inspeksi langsung, pengamatan langsung di tempat, dan membuat laporan di tempat.

Namun, ada yang berpendapat cara inilah yang terbaik, karena melakukan kontak langsung antara atasan dan bawahan dapat dipererat, serta kesukaran dalam praktik dapat dilihat langsung dan tidak dapat dikacaukan oleh pendapat bawahan sebagaimana mungkin terselip dengan cara menerima laporan tertulis (Manullang, 1992: 178).

Menurut Saydam (2000:20) mengemukakan tujuan pengawasan yaitu: "Terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas, kebijaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh atasan langsung." Adapun tujuan dari pengawasan adalah :

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
- e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Pengertian pengawasan menurut Heidjarachman dan Husnan (1998: 358) adalah sebagai berikut : “Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan atau penyesuaian kembali rencana yang telah dibuat.”

Di dalam bukunya, Saydam (2000:167) menjelaskan tentang macam-macam pengawasan yang dikenal dalam ilmu manajemen, walaupun sasaran pengawasan tidak terjadi penyimpangan (deviasi) dalam pelaksanaan pekerjaan, tetapi dilihat dari siapa yang melakukan pengawasan itu, maka pengawasan dapat dibedakan atas:

- (a) Pengawasan fungsional. Pengawasan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat fungsional atau aparat pengawasan yang secara fungsional tugasnya memang mengawasi pelaksanaan tugas-tugas.
- (b) Pengawasan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat yang disampaikan baik secara lisan kepada aparat yang berkepentingan, maupun tertulis melalui media cetak, dan sebagainya.
- (c) Pengawasan melekat. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan. Pengawasan ini melekat pada jabatan yang dipangku oleh seorang pimpinan, sehingga pengawasan merupakan kewajiban yang bersifat mutlak, dan harus dilakukan secara terus menerus.

Pengawasan menurut Siagian (2005:134) dapat dilakukan dengan mempergunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung, dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk:
 - (a) Inspeksi langsung
 - (b) Observasi ditempat,
 - (c) Laporan ditempat, yang berarti juga penyampaian keputusan di tempat bila diperlukan karena makin kompleksnya tugas seorang manajer, pengawasan langsung tidak selalu dapat dijalankan dan sebagai gantinya sering dilakukan dengan pengawasan tidak langsung.

2. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan ini adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk:

- (a) Laporan lisan,
- (b) Laporan tertulis.

Menurut Hani Hadoko dalam Dwi Puspita Sari (2011) menyatakan bahwa ada beberapa indikator dalam beberapa proses pengawasan diantaranya adalah :

- 1) Penetapan Standar.
- 2) Pengukuran pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Perbandingan pelaksanaan dengan standar.
- 4) Perbaikan atas penyimpangan.

Kelemahan dari pengawasan bentuk ini adalah bahwa di dalam laporan-laporan itu hanya dibuat laporan-laporan yang baik saja yang diduga akan menyenangkan atasan. Manajer yang baik akan meminta laporan tentang hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Sebab kalau laporan-laporan itu berlainan dengan kenyataan akan menyebabkan manajer memberi kesan yang berlainan juga mengambil keputusan yang salah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat para ahli tersebut bahwa pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dengan cara inspeksi langsung, observasi di tempat, dan laporan ditempat pada waktu pekerjaan sedang berlangsung.

2.4. Program Bantuan Bedah Rumah Layak Huni

Menurut Edy Sutrisno (2014) dalam pandangannya tentang kemiskinan bahwa kebutuhan dasar seseorang atau kelompok meliputi banyak kebutuhan seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, pangan, pekerjaan, perumahan, air bersih, sumber daya alam dan kebutuhan dasar lainnya yang menjadi pokok kebutuhan manusia. Jika semua kebutuhan itu terpenuhi, sehingga masyarakat mendapatkan hak dan penyelenggaraan kehidupan sosial.

Untuk menjembatangi agar masyarakat dapat hidup layak dan sejahtera serta potensi masyarakat dalam memberikan bantuan yang berdasarkan pada nilai kemanusiaan solidaritas sosial tersebut dengan masyarakat yang mengalami masalah penyandang butuh bantuan, maka diperlukan institusi, sehingga dalam hal ini efektivitas institusi ditentukan oleh dua hal yaitu kepercayaan dan penguasaan jaringan. (Syawei, 2012).

Program bantuan bedah rumah di Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil berlangsung pada tahun 2018 dimana pada bantuan bedah rumah layak huni dan merupakan salah satu bentuk bantuan untuk menanggulangi kemiskinan bagi masyarakat miskin yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pelaksanaan program bantuan dan pengadaan rumah layak huni tersebut ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu di Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Program pembangunan bantuan rumah layak huni ini dilakukan sesuai yang dijelaskan di dalam pedoman dan pelaksanaan pembangunan Bidang

Pemukiman pada pola pemberdayaan masyarakat, dalam program pembangunan yang berbasis pada pendekatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat melalui 3 tahap yaitu:

- 1) Pembangunan yang berkualitas, artinya pembangunan infrastruktur dibangun melalui standar dan teknik pembangunan yang disepakati.
- 2) Partisipatif, masyarakat terlibat di dalam proses pembangunan secara langsung dan aktif di dalam kegiatan dimulai dari awal proses perencanaannya, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.
- 3) Otonomi dan desentralisasi, disini masyarakat mendapatkan kepercayaan yang luas dan kesempatan didalam kegiatan dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, dan hasil akhirnya sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang telah berlaku.

Menurut Edward yang dikutip dari (Khotimah, 2017), beberapa faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu proses implementasi yaitu Pertama, komunikasi yang baik dalam perencanaan suatu program yang dilakukan dengan jelas bagi para pelaksananya. Hal ini menyangkut dari bagaimana proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi yang disampaikan. Kedua, sumber daya hal ini terdiri dari empat komponen yaitu ter- penuhi jumlah tim pelaksana dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu dapat dilihat seberapa jauh kebutuhan, nilai, serta kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Efektivitas Pelaksanaan Program Bedah Rumah Layak Huni yang adalah suatu ukuran dimana suksesnya suatu organisasi penyelenggara kebijakan dan didefinisikan apakah organisasi yang menyelenggarakan kebijakan dapat mencapai tujuannya atau ke-perluannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu organisasi dapat mampu menyusun dan melaksanakan pengorganisasian sumber daya untuk mencapai tujuannya.

Dari definisi diatas maka efektivitas pelaksanaan program bedah rumah layak huni Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk mengukur tingkat efektifnya yaitu bagaimana melihat kemampuan suatu organisasi dalam menyelenggarakan kebijakan bedah rumah layak huni agar mencapai tujuannya dan hal ini sudah sejalan dengan tujuan dari program bedah rumah untuk memberdayakan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh William Dunn 2000 bahwa efektivitas adalah suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif yang dijadikan rekomendasi dan didasarkan pada pertimbangan apakah alternatif yang telah direkomendasikan tersebut memberi hasil atau akibat yang maksimal, terlepas dari pertimbangan efisiensi (Ardi, 2018) sama seperti yang diungkapkan dari William Dunn bahwa efektivitas memberi hasil atau akibat yang maksimal, masyarakat Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil merasakan.

Konsep Bedah Rumah Sistem dan Prosedur Pencairan Dana bantuan Bedah Rumah. Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan, Kesejahteraan, dan Pemerataan Pembangunan di Pedesaan melalui Dana APBN Kabupaten , Provinsi dan Pusat, Pemerintah Kabupaten Provinsi dan Pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10 persen untuk alokasi dana desa.

Pemerintah Desa/ Penyelenggara Program Bedah Rumah. Bedah Rumah Syarat penerima bantuan Program Bedah Rumah menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13/PRT/M/201016 tentang Bantuan Stimulan Bantuan Bedah Rumah, atau yang dikenal Bedah Rumah BAB IV pasal 13 yaitu sebagai berikut:

- (1) Perseorangan penerima BPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a) Warga negara indonesia yang sudah berkeluarga.
 - b) Memiliki atau menguasai tanah.
 - c) Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak.
 - d) Belum pernah memperoleh BPS dari pemerintah pusat.
 - e) Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat.
 - f) Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
 - g) Bersedia membentuk kelompok , dan

h) Bersedia membuat pernyataan.

Bedah rumah merupakan bagian dari upaya pemerintah dan bagian dari Pembangunan Nasional. dimana Tujuan Pembangunan Nasional merupakan suatu proses yang terus-menerus dan berkesinambungan (Afifudin, 2012).

2.5. Pemerintah Desa/ Penyelenggara

Program Bedah Rumah Osborne dan Plastrik (2000;55) Pemerintah merupakan Lembaga yang besar Kompleks, dan Ruwet. Desa memiliki potensi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi desa. untuk menunjang keberhasilan pemerintah upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu memperkuat desa merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah. Sebagai Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa (UU No. 6 Tahun 2014), Melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Syarat penerima bantuan Program Bedah Rumah menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13/PRT/M/201016 tentang Bantuan Stimulan Bantuan Bedah Rumah, atau yang dikenal Bedah Rumah BAB IV pasal 13 yaitu sebagai berikut:

(1) Perseorangan penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

- a) Warga negara indonesia yang sudah berkeluarga.
- b) Memiliki atau menguasai tanah.
- c) Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tdak layak.
- d) Belum pernah memperoleh BPS dari pemerintah pusat.
- e) Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat.
- f) Di utamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
- g) Bersedia membentuk kelompok , dan
- h) Bersedia membuat pernyataan.

Bedah rumah merupakan bagian dari upaya pemerintah dan bagian dari Pembangunan Nasional. dimana Tujuan Pembangunan Nasional merupakan suatu proses yang terus-menerus dan berkesinambungan (Afifudin, 2012). Sebagai tingkat keberhasilan dari program bedah rumah ini melaksanakan tujuan atau sasaran dari program bedah rumah ini dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini efektivitas dapat diukur efektifitasnya yaitu dengan Pendekatatan Sasaran, Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses, dan Pendekatan Integratif.

Desa Bukit Harapan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki 300 Kepala Keluarga dan jumlah penduduk di Desa tersebut sebanyak 2.375 jiwa. Penduduk desa

ini berasal dari pulau Jawa, Madura serta penduduk asli Pakpak Boang dan pendatang asal Aceh.

Penduduk desa Bukit Harapan banyak bergantung pada mata pencaharian berkebun kelapa sawit, buah-buahan, serta sayur-mayur. Di desa ini juga sudah terdapat beberapa sekolah yaitu, SMAN 2 Gunung Meriah, SDN 01 Bukit Harapan, Madrasah Diniyah Ashabul Yamin, Madrasah Diniyah At Taubah dan Tk Bunga Lestari. Dengan adanya beberapa sekolah tersebut, masyarakat di Desa Bukit Harapan menjadi lebih mudah mengakses pendidikan. Selain pendidikan akses jalan di desa tersebut juga sangat bagus dan tidak ada lagi jalanan yang berlubang dan memudahkan masyarakat beraktifitas. Namun untuk akses kesehatan, di desa tersebut hanya memiliki satu Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang terletak tidak jauh dari pemukiman warga Program Bedah rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah Lampung Timur adalah salah satu bentuk dari pemerintahan yang baik dalam mewujudkan masyarakat yang memenuhi aspek tempat tinggal yang layak. Saat ini, pemerintah Lampung Timur dalam hal ini sebagai pemerintahan yang mewakili dari kepentingan Negara. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang a quo bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵ Program bedah rumah merupakan kebijakan yang lahir dari Negara Indonesia melalui Kementerian Sosial. Dalam hal ini Kementerian Sosial telah memiliki kebijakan (policy) dalam membantu masyarakat yang belum memenuhi tempat tinggal. Oleh karenanya, untuk mewujudkan negara sejahtera (welfare state) pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Sosial perlu membuat kebijakan yang tentunya untuk mewujudkan hal itu.

Pada tahun 2021 program bedah rumah melalui Dinas Sosial telah menetapkan kebijakan pada tahun 2021. Melalui kementerian Sosial yang termuat dalam Keputusan PLT Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor 791/6.2/HK.01/11/2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahap XXXV Program Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Tahun 2021, diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu terhadap fasilitas tempat tinggal. Dengan proses berjalannya, terkadang program yang telah ditetapkan harus ada badan pengawasan, supaya menghindari dari hal-hal yang menyeleweng (absolut power). Oleh karenanya hal ini menjadi perhatian khusus oleh para penyelenggara negara, untuk dapat memastikan proses berjalannya program tersebut. Saat ini Implementasi program bedah rumah tahun 2021 Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil telah dilaksanakan, akan tetapi menjadi perhatiannya bahwa implementasi program bedah rumah telah tepat sasaran atau belum. Maka dari penjelasan tersebut

perlu dilihat alokasi dana atau mekanisme dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini yang berwenang terhadap masyarakat yaitu kepala desa. Kepala desa sebagai instrumen penting, terhadap berjalan atau tidaknya program bedah rumah, baik secara prosedural dalam penetapan bantuan, maupun alokasi dana yang tepat dan baik

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode berasal dari bahasa Inggris *method* yang artinya cara, yaitu cara untuk mencapai tujuan. Metode penelitian berarti prosedur pencarian data, meliputi penentuan populasi, sampling, penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara pengumpulan data dan teknik analisisnya (Jamaludin, 2011: 54).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2010: 15).

Metode ini bersifat deskriptif, sehingga data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam bentuk angka-angka yang lebih menekankan proses daripada produk.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa metode penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan masalah-masalah yang ditemukan dengan apa adanya. Penelitian yang bersifat

deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Irawan Soeharto, 2008: 35).

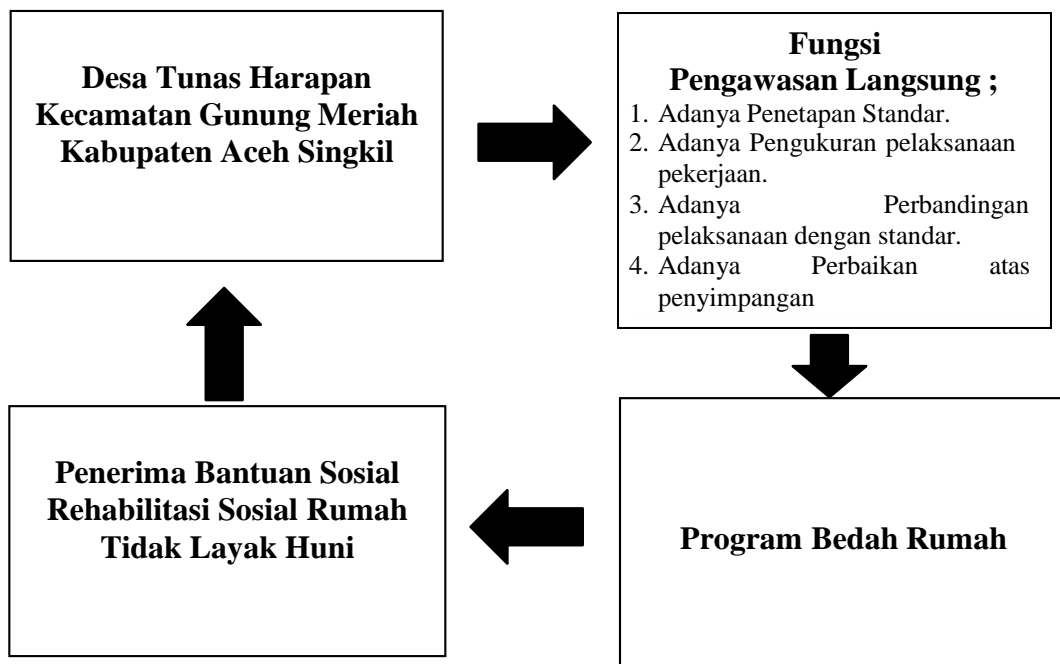
3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.

Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Sebagaimana Judul penelitian yakni “ Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil”. Maka dapat digambarkan bahwa Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan kaitannya dengan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan publik.

Berkaitan dengan gambaran tersebut penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada gambar dibawah ini yakni :

Gbr. Kerangka Konsep



3.3. Devenisi Konsep

Dari Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas devenisi konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Devenisi Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Dengan kata lain

Devenisi Konsep adalah natasan yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian. Maka dalam penelitian ini. Devenisi Konsep yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Fungsi ; fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan
2. Pengawasan Langsung ; Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Dalam pengawasan langsung dapat dilakukan dengan peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Cara ini mengandung kelemahan, menimbulkan kesan kepada bawahan bahwa mereka diamati secara keras dan kuat sekali. Pengawasan adalah upaya memeriksa semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari.
3. Program Bedah Rumah ; Program pembangunan bantuan rumah layak huni ini dilakukan sesuai yang dijelaskan di dalam pedoman dan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemukiman pada pola pemberdayaan masyarakat, dalam program pembangunan yang berbasis pada pendekatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat. Bedah rumah adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk merenovasi rumah masyarakat yang kurang layak dan tidak layak huni

masyarakat yang mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria yang di tetapkan pemerintah daerah.

4. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ;
Syarat penerima bantuan Program Bedah Rumah menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13/PRT/M/201016 tentang Bantuan Stimulan Bantuan Bedah Rumah, atau yang dikenal Bedah Rumah BAB IV pasal 13 yaitu sebagai berikut: Perseorangan penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan

3.4 Katagorisasi

Katagorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur atau sebagai indikator variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi penggolongan variable yang akan digambarkan sebagi sebuah pendekatan untuk mendapatkan kebenaran. Adapun Katagorisasi dalam penelitian ini yakni :

Katagorisasi Fungsi Pengawasan Langsung ;

1. Adanya Penetapan Standar.
2. Adanya Pengukuran pelaksanaan pekerjaan.
3. Adanya Perbandingan pelaksanaan dengan standar.
4. Adanya Perbaikan atas penyimpangan

3.5 Narasumber

Narasumber dala penelitian ini ialah “ Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ” yakni beberapa narasumber fihak instansi

terkait, pelaksana pengawasan langsung dan masyarakat penerima bantuan program bedah rumah. Penulis Menetapkan Nara sumber yakni :

- 1) Camat Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Subuhussalam
- 2) Kepala Desa, Pengawai dan staf Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh
- 3) Masyarakat penerima bantuan program bedah rumah

3.6 Tekhnik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskripsi lapangan dan penyelarasan yang merujuk pada literatur yang berkenaan dengan teori-teori yang diperlukan oleh peneliti sebagai pembanding. Sedangkan deskripsi lapangan untuk mencari data yang diperlukan peneliti untuk dituangkan. Maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan deskripsi kualitatif, suatu penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang berhubungan secara langsung dengan masalah yang dibahas orang yang terdapat di daerah tersebut. Responden merupakan orang yang bersedia dimintai keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat berupa tulisan atau lisan (Arikunto, 2010: 122).

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah narasumber yaitu pihak instansi terkait dalam hal ini narasumber pihak instansi

terkait, pelaksana pengawasan langsung dan masyarakat penerima bantuan program bedah rumah. yang dimintai keterangan seputar permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Pemilihan responden atau informan yang tepat, akan menjamin validitas data yang didapat dari wawancara. Sebaliknya, pemilihan informan yang salah akan mengakibatkan data yang diperoleh akan sama dan tidak valid. Penelitian ini mengambil beberapa informan tertentu (Key Informan) sebagai subjek penelitian yang dianggap mampu mewakili stakeholder yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang diambil dari dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti: photo-photo kegiatan, dan monografi sarana usaha fihak instansi terkait, para pedagang dan masyarakat (konsumen) pelanggan, arsip kegiatan. Hal ini dilakukan adalah untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, serta untuk mengetahui kebenaran narasumber dalam memberikan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas dua bagian, yakni: Teknik pengumpulan data yang bersifat primer adalah dengan menggunakan observasi atau pengamatan serta wawancara mendalam atau indepth interview, dan dokumentasi. Sedangkan untuk data yang bersifat sekunder seperti teori, pandangan-pandangan hasil penelitian, buku dan catatan studi dokumentasi

dan kepustakaan. Adapun dalam pengumpulan data digunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu :

a) Observasi

Observasi merupakan penyelidikan mendalam tentang gejala sosial secara sistematis (Adon Nasrullah Jamaludin, 2011: 62). Ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber primer, khususnya untuk melihat situasi lokasi, suasana kehidupan dan perilaku-perilaku subjek peneliti yang teramati.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung. Dimana penelitian melakukan kunjungan langsung ke lapangan, melihat tingkah laku objek, gejala-gejala yang tampak di tempat penelitian serta melihat kondisi yang relevandi lingkungan dan mengamati berbagai kemungkinan sebagai tambahan dimensidimensi baru dalam konteks memahami fenomena yang diteliti tersebut atau pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap berbagai gejala yang tampak pada setiap penelitian, dengan jalan mengumpulkan dan melalui pengamatan dan pencatatan dan pelaksanaan langsung pada tempat dimana peristiwa atau keadaan itu sedang terjadi.

Observasi yang dilakukan bisa bersifat formal maupun kurang formal. Observasi formal dilakukan untuk mengukur peristiwa tipe perilaku tertentu dalam periode waktu tertentu di lapangan. Sedangkan observasi kurang formal dilakukan selama melangsungkan kunjungan lapangan, termasuk

kesempatan-kesempatan selama pengumpulan bukti yang lain (wawancara dan dokumentasi).

b) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung. Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pertanyaan, percakapan dan Tanya jawab secara lisan dan langsung dengan tatap muka pada informan dengan menggunakan interview guide (pedoman wawancara) tujuannya untuk mengetahui mengenai masalah yang ada tidak dapat diobservasi, kemudian jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (Moleong, 2006: 67).

Dalam penelitian ini, sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu "membuka pintu" kemana saja penelitmelakukan pengumpulan data (sugiyono, 2010: 400).

Dalam penelitian ini peneliti mencari beberapa orang yang menjadi tokoh kunci dari objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil wawancara akan digunakan untuk sumber penunjang dalam proses penganalisaan data secara deskriptif. Hal ini untuk mengetahui pandangan, pendapat, keterangan atau pernyataan-pernyataan yang dilihat dan dialami oleh responden dan informan.

Wawancara dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan memakai sistem angket atau kuesioner. Penelitian ini menggunakan dua tipe

wawancara, yaitu wawancara yang bertipe open-ended dan wawancara terfokus. Wawancara open ended dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada informan kunci tentang suatu peristiwa tertentu dan opini atau pendapat mereka tentang hal tertentu

c) Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang didapat dari wawancara, pengamatan, ataupun dari studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang didapat tersebut dirangkum dan dikategorisasikan dan dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh. Untuk mendeskripsikan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan instrumen data Sebelum penelitian terjun untuk melakukan penelitian ke lapangan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk memudahkan pengumpulan data.
- 2) Pengumpulan data Selama penelitian di lapangan baik di Instansi terkait Camat dan para pengawai serta staf pelaksana tugas pelayanan publik dan masyarakat umum pengguna jasa pelayanan publik di kantor Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Subuhussalam
- 3) Klasifikasi data Setelah melakukan penelitian langkah selanjutnya adalah pengklasifikasian data untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan kemudian di kelompokkan menjadi satu, untuk ditarik kesimpulan.

- 4) Analisis data Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data dengan pendekatan analogis logika yaitu dengan cara menjelaskan dan menarik kesimpulan dengan bertitik tolak kepada hal-hal yang di pertanyakan dan tujuan penelitian.
- 5) Penarikan kesimpulan Setelah pengumpulan data kemudian ditarik kesimpulan serta menyantumkan saran-saran

5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Yang menjadi lokasi dan jadwal penelitian ini Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Lokasi ini penulis pilih menjadi tempat penelitian karena mengingat lokasinya yang sangat dekat dengan tempat asal kampung halaman penulis sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian.

Sebelum menentukan lokasi penelitian diatas penulis melakukan penjajakan lapangan untuk melihat dan menilai apakah ada kesesuaian antara masalah yang dirumuskan dengan kenyataan dilapangan. Selain itu juga dengan mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan lingkungan, hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri, mental maupun fisik serta perlengkapan yang diperlukan, waktu dan biaya tenaga pula menjadi pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisi data ini berfokus pada Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan beberapa tokoh masyarakat di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber.

5.2. Deskripsi Hasil Wawancara

5. Adanya Penetapan Standar.

1) Apakah ada penetapan Standar Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah di Desa Tunas harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil ?

Pengawasan sangat diperlukan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki tindakan- tindakan yang salah di dalam pelaksanaannya dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan kerja berusaha agar produksi yang dibutuhkan dapat

dihasilkan dengan cara yang efektif dan seefisien mungkin dengan kualitas yang diharapkan dan dalam memproduksi barang tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rencana.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Subuhussalam menyatakan bahwa ; Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil senantiasa dilalukan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan selama sesuatu kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketepatan suatu kegiatan.perlu memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan maka program ini akan tetap sesuai dengan sasaran dan berjalan dengan baik tanpa perdebatan yang berarti, jika di lihat dari definisi Rumah Layak Huni yaitu: Bahan Lantai berupa Tanah atau Kayu kelas IV, bahan dinding berupa Bilik Bambu/Kayu/Rotan atau Kelas Kayu IV, tidak atau kurang mempunyai Ventilasi dan Pencahayaan,Bahan Atap berupa Daun atau Genteng Plentong yang sudah Rapih, Rusak Berat dan/atau, Rusak Sedang dan Luas Tanah Tidak Mencukupi Standar Minimal per Anggota Keluarga.

Berdasarkan Keputusan Kementrian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat No 17/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah dimana beberapa hal yang harus diperhatikan: Ketentuan

Umum, Bentuk Bantuan, Jenis dan Besaran, Syarat Penerima Bantuan, Penyelenggaraan Bantuan, Penetapan Calon Penerima Bantuan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan

2) Apakah penetapan standar pengawasan tersebut menjadi pedoman dalam program beda rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Pengawai dan staf Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh menyatakan bahwa ; Pengawasan sangat diperlukan dalam menjalankan produksi demi tercapainya tujuan, dengan pengawasan apabila terjadi kesalahan pemimpin telah mengetahui sejauh mana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para karyawan dan jalan apa yang harus diambil untuk langkah-langkah selanjutnya.

Pengawasan berhubungan cukup erat dengan perencanaan, rencana tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada pengawasan di dalam pelaksanaannya, dengan adanya pengawasan dapat dibandingkan hasil yang sedang dicapai dengan hasil menurut rencana Pengawasan mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka.

3) Apakah penetapan standar pengawasan efektif dalam pelaksanaan program bedah rumah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah di bidang pengawasan dalam membantu Presiden sebagai Administrator Pemerintahan yang tertinggi dalam mengendalikan administrasi negara. Dengan kata lain, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh badan/organisasi/unit kerja yang volume dan beban kerja atau tugas pokoknya di bidang pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh badan ini terhadap aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan disebut sebagai pengawasan dari luar (ekstern).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Pengawai dan staf Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh menyatakan bahwa : pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya dalam mewujudkan manajemen yang sehat di lingkungan organisasi/unit kerja masing-masing. Pengawasan ini disebut sebagai pengawasan atasan langsung sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan atasan langsung (pengawasan intern). Untuk melaksanakan tugas pengawasan ini setiap atasan langsung dapat melakukannya sendiri dan dapat pula menunjuk sejumlah pembantu, misalnya berupa tim tetap atau berkala.

Program bedah rumah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan

perumahan Tunas Harapan merupakan upaya peningkatan kemampuan atau daya kelompok sasaran yang kurang berdaya dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah dan lingkungan yang sehat dan aman. Kemudian masyarakat sebagai pemangku kepentingan sekunder atau warga yang diberdayakan maka program pemberdayaan masyarakat perumahan Tunas Harapan merupakan upaya peningkatan kemampuan komunikasi yang telah dimiliki sehingga mampu mengakses dan melaksanakan kegiatan dari program yang akan dilaksanakan berikutnya.

6. Adanya Pengukuran pelaksanaan pekerjaan.

4) Apakah ada pengukuran standar pelaksanaan kerja dalam program bedah rumah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Pengawai dan staf Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh menyatakan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawas bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi.

Data-data dan informasi ini digunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan yang

telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat melakukan tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan.

Efektifitas dari program bedah rumah Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Atas masih perlu ada pembenahan yang harus dilakukan dari pihak penyelenggara. Para penerima sudah memiliki rumah yang layak huni dan sebagainya. Beberapa bentuk dari program bedah rumah ini yang tidak baik dan tidak diperlukan. Ini tidak sampai dengan menyelesaikan aktifitas kerja atau pelaksanaan pekerjaan yang membuat bentuk dari program bedah rumah tersebut sampai dengan sekarang belum bisa digunakan.

Program bedah rumah Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, yaitu berupa fasilitas bahan bangunan atau berupa uang untuk membeli bahan bangunan. Maksud program bantuan stimulant swadaya adalah untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah, membangun rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman. Sedangkan tujuan program bantuan stimulan perumahan swadaya adalah membangun rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman oleh masyarakat rentan itu sendiri. Lingkup program BPS meliputi bantuan pembangunan rumah baru, perbaikan total rumah rusak berat, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pembangunan prasarana, sarana utilitas umum lingkungan kumuh, pembangunan utilitas yang melekat pada rumah. Pemerintah atau

pemerintah daerah menyelenggaraan kegiatan ini ditujukan untuk kelompok sasaran utama adalah masyarakat miskin

5) Apakah standar pengukuran tersebut memberi manfaat terhadap pelaksanaan pengawasan program bedah rumah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Pengawai dan staf Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh menyatakan bahwa : Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control), pengawasan ini sering disebut “Ya-Tidak”, screening control atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dengan dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” Jika dilihat dari inputnya program bedah rumah ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh penerima bantuan program bedah rumah ini, akan tetapi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jalannya program bedah rumah ini belumlah bagus di mana bentuk dari bantuan program bedah rumah ini masihlah kasar.

Kelayakan dan kriteria penerima bantuan program bedah rumah serta anggaran yang harus diketahui oleh masyarakat. Program Bedah Rumah ini merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dalam upaya membantu masyarakat yang miskin, memiliki rumah yang tidak

layak huni serta bagi warga masyarakat yang belum memiliki rumah atau tempat tinggal. Dalam proses jalannya program bedah rumah ini masih harus dilakukan pembenahan mekanisme yang tidak baik dan tidak sesuai, dimana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan atau koordinasi antara Hukamtua dengan BPD tidak baik.

6) Apakah pengukuran standar sebagai bagian pengawan program bedah rumah menjadi bahan evaluasi di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Pengawai dan staf Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh menyatakan bahwa : Pemimpin harus merumuskan hasil yang akan dicapai se jelas mungkin. Tujuan yang dinyatakan secara umum atau kurang elas seperti pengurangan biaya over head atau meningkatkan pelayanan pelanggan., perlu dirumuskan lebih jelas seperti pengurangan biaya over head dengan 12% atau menyelesaikan setiap keluhan konsumen dalam waktu tiga hari.

Disamping itu hasil yang diinginkan harus dihubungkan dengan individu yang bertanggung jawab atas pencapaiannya Menetapkan petunjuk. Tujuan pengawasan sebelum dan selama kegiatan dilaksanakan adalah agar manajer dapat mengatasi dan memperbaiki adanya penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan. Tugas penting menejer adalah merancang program pengawasan untuk menemukan sejumlah

indikator yang terpercaya sebagai petunjuk apabila tindakan koreksi perlu diambil.

Dasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa dalam proses jalannya program bedah rumah ini para penerima program bantuan program bedah rumah ini telah memiliki tempat tinggal atau rumah yang telah layak huni, dari hasil wawancara juga para penerima bantuan program bedah rumah ini merasa bahwa tidak layak untuk menerima bantuan program bedah rumah ini, Dalam proses pemerintah menentukan siapa-siapa penerima bantuan program bedah rumah ini dari hasil penelitian menunjukkan masi kurang bagus dan harus diperhatikan kembali, , untuk itu dari hasil penelitian yang di lakukan dilapangan bahwa pemerintah/penyelenggara program bedah rumah ini harus memperjelaskan penerima bantuan program bedah rumah ini untuk kedepan lebih bagus.

7. Adanya Perbandingan pelaksanaan dengan standar.

7) Apakah ada perbandingan pelaksanaan dengan standar dalam program bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Pengawai dan staf Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh menyatakan bahwa : Bahwa Program Bedah Rumah perlu dilanjutkan agar masyarakat yang hidupnya kurang beruntung merasa diperhatikan dan dibantu, terutama pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni. Adanya program bedah rumah mendidik warga

masyarakat untuk peduli kepada sesama dan belajar beramal karena pada hakekatnya harta yang kita miliki itu sebagian terdapat milik orang lain yang membutuhkan seperti anak yatim dan orang miskin termasuk duafa. Mereka dapat hidup layak seperti umumnya masyarakat Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor 792/6.2/HK.01/11/2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahap XXXV Program Penangan Fakir Miskin Wilayah I Tahun 2021.

Proses pelaksanaan program bedah rumah telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang- Undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Selanjtunya dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Bedah Rumah merupakan kebutuhan yang wajib sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia.

Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil telah dilaksanakan dengan ketentuan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Dalam hal ini komunikasi atau sosialisasi terhadap Program Bedah Rumah telah dilaksanakan Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil melalui Pemerintahan Desa. Selain itu tentunya komunikasi tersebut dilihat dari

kewenangan yang mengatur dan melaksanakan Program Bedah Rumah Tahun 2021. Selain itu mekanisme pelaksanaan penyelenggara program bedah rumah tahun 2021 menggunakan metode top down.

8) Apakah perbandingan pelaksanaan tersebut memberi dampak terlaksananya pengawasan langsung dalam program bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh menyatakan bahwa : Setiap tipe standar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk hasil yang dapat dihitung. Ini memungkinkan manajer untuk mengkomunikasikan pelaksanaan kerja yang diharapkan kepada para bawahan secara lebih jelas dan tahapan-tahapan lain dalam proses perencanaan dapat ditangani dengan lebih efektif. Standar harus ditetapkan secara akurat dan diterima mereka yang bersangkutan.

Penanganan program bantuan bedah rumah ini terkhusus di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh, , telah terbilang cukup baik disetiap tahapnya akan tetapi disamping itu juga terdapat kesenjangan sosial kenyataan tidak sesuai dengan harapan, karena kurang validnya data penduduk miskin dan jumlah data masyarakat yang tidak memiliki hunian yang layak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan peneliiian yang berjudul “Evaluasi Program

Bedah Rumah (studi terhadap penerima manfaat bantuan bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten

Aceh "penelitian ini diperuntukkan untuk meninjau kembali sejauh mana pencapaian terhadap program yang telah dilaksanakan dan bagaimana dampak program bedah rumah terhadap penerima manfaat bantuan bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh

9) Apa kendala dalam perbandingan pelaksanaan dengan standar dalam program bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh menyatakan bahwa : Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Timur Pada Tahun 2021 Sudah Tepat Sasaran yaitu telah dilaksanakan dengan tepat sasaran.

Berdasarkan data wawancara dan data verifikasi Kementerian Sosial yang telah dilaksanakan, namun ada beberapa kendala yang ditemukan yaitu menyangkut anggaran Rp. 20.000.000./PKM yang dirasakan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan program Bedah Rumah bagi masyarakat. Selanjutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial dan Kepala Desa terhadap Program Bedah Rumah Tahun 2021 telah melaksanakan ketentuan Peraturan. Dilihat dari hasil wawancara dan tugas yang dilaksanakan dalam Program Bedah Rumah Tahun 2021. Karena kedua lembaga pemerintah tersebut memiliki kewenangan yaitu sebagai lembaga yang memonitoring, pemantauan dan

evaluasi kerja yang ada dilapangan terhadap Program Bedah Rumah Tahun 2021. Sehingga pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prinsip pemerintah yang baik (good government)

8. Adanya Perbaikan atas penyimpangan

10) Apakah pengawan yang di lakukan ada Upaya perbaikan atas penyimpangan pelaksanaan bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Berdasarkan Data yang di himpun dari Badan Pembangunan Daerah Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil penerima bantuan stimulan Perumahan Swadaya tahun anggaran 2013 Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yaitu, Sebanyak 1.372 Kepala Keluarga Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil penerima terbanyak yaitu 498 Kepala Keluarga. Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil merupakan penerima ketiga terbanyak dari tiap desa yaitu sebanyak 103 Kepala Keluarga.

Masing-masing Kepala Keluarga penerima bantuan mendapatkan bantuan dana Bedah Rumah sebesar enam juta rupiah dan diturunkan melalui dua tahap, tahap pertama berupa uang tunai sebesar tiga juta rupiah yang dicairkan melalui Bank dan tahap kedua yaitu berupa barang/ bahan bangunan yang senilai dengan uang sebesar tiga juta

rupiah. Bantuan dana tersebut tersebut sepenuhnya harus digunakan dalam pembangunan rumah penerima bantuan.

Program ini bertujuan member bantuan kemudahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memperoleh akses ke sumber pembiayaan sehingga mendapatkan biaya yang terjangkau untuk membangun rumah sendiri, baik pembagunan baru maupun meningkatkan kualitas rumah.

11) Apakah perbaikan atas penyimpangan tersebut menghasilkan pelaksanaan program bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh menyatakan bahwa : Meskipun sudah melalui proses yang panjang, ternyata program tersebut dinilai masih belum maksimal. Sebagaimana tujuan dari Program Bedah Rumah adalah upaya pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun rumah layak huni untuk mensejahterakan masyarakat.

Namun disisi lain ternyata program ini juga membuat masyarakat penerima bantuan merasa terbebani. Hal ini disebabkan oleh banyaknya persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh BAPPEDA yang membuat masyarakat penerima merasa terbebani, salah satu contohnya ialah ketika dana tahap pertama turun berupa uang Rp. 3.000.000 untuk masing-masing kepala keluarga rata-rata hanya cukup untuk membangun pondasi rumah saja. Sedangkan dana tahap kedua akan turun apabila seluruh

penerima bantuan telah memasang batu bata atau dinding rumah setinggi 30cm.

Sehingga menimbulkan permasalahan pada masyarakat penerima itu sendiri yang terpaksa mencari/mengeluarkan dana sendiri untuk melengkapi kekurangan persyaratan yang ditentukan oleh BAPPEDA. Bahkan sebagian penerima bantuan melakukan pinjaman dana kepada saudaranya dan ada juga masyarakat melakukan pinjaman pada penjual batu bata dengan melakukan perjanjian pembayaran pada saat dana tahap kedua turun. Namun pada tahap kedua dana turun berupa bahan bangunan yang diambil di salah satu toko bangunan yang telah ditentukan bersama, sehingga masyarakat penerima bantuan harus mengeluarkan dana lagi untuk mengembalikan pinjaman dana yang dilakukan pada saat kekurangan dana dalam membangun rumahnya

12) Apa pandangan bapak terhadap pelaksanaan tersebut pada hal adanya perbaikan atas penyimpangan dalam program bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Masyarakat penerima bantuan program bedah rumah Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh menyatakan bahwa : Adapun Pelaksanaan Bedah Rumah berjalan selama dua bulan lebih. Dana yang digunakan pada pelaksanaan Program Bedah Rumah ini Enam juta rupiah perorang penerima bantuan. Dana Pelaksanaan Bedah Rumah tersebut dicairkan oleh BAPPEDA Kabupaten Aceh melalui dua kali pencairan dana. Pencairan dana tahap pertama yaitu tiga juta rupiah berupa uang yang

dicairkan melalui bank dan pada tahap kedua berupa barang atau bahan bangunan yang senilai dengan uang juta rupiah yang bisa di ambil oleh penerima di took bangunan yang telah ditentukan bersama. Jarak pencairan dana tersebut ialah tiga minggu dari pencairan dana tahap pertama. Besar dana untuk membangun rumah swadaya sebagaimana dimaksud tidak termasuk untuk membayar upah pekerja dan retribusi perijinan

4.2. Pembahasan

Dari hasil tinjau penelitian, wawancara dan analisa dalam pelaksanaan peneltian tersebut maka pada uraian selanjutkan penulis memaparkan analisis pembahasan dari topic penelitian yakni “Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ”, sebagaimana tersebut dibawah ini

1. Adanya Penetapan Standar.

1) Apakah ada penetapa Standar Pengawasan Langsunh Dalam Program Bedah Rumah di Desa Tunas harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil ?

Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki

persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22)

Pengawasan sangat diperlukan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki tindakan- tindakan yang salah di dalam pelaksanaannya dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan kerja berusaha agar produksi yang dibutuhkan dapat dihasilkan dengan cara yang efektif dan seefisien mungkin dengan kualitas yang diharapkan dan dalam memproduksi barang tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rencana.

Brantas (2006: 188) Fungsi pengawasan (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik- baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Pengawasan ini dilakukan selama sesuatu kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketepatan suatu kegiatan. perlu memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan maka program ini akan tetap sesuai dengan sasaran dan berjalan dengan baik

tanpa perdebatan yang berarti, jika di lihat dari definisi Rumah Layak Huni yaitu: Bahan Lantai berupa Tanah atau Kayu kelas IV, bahan dinding berupa Bilik Bambu/Kayu/Rotan atau Kelas Kayu IV, tidak atau kurang mempunyai Ventilasi dan Pencahayaan, Bahan Atap berupa Daun atau Genteng Plentong yang sudah Rapuh, Rusak Berat dan/atau, Rusak Sedang dan Luas Tanah Tidak Mencukupi Standar Minimal per Anggota Keluarga.

Berdasarkan Keputusan Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat No 17/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah dimana beberapa hal yang harus diperhatikan: Ketentuan Umum, Bentuk Bantuan, Jenis dan Besaran, Syarat Penerima Bantuan, Penyelenggaraan Bantuan, Penetapan Calon Penerima Bantuan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan

2) Apakah penetapan standar pengawasan tersebut menjadi pedoman dalam program beda rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Menurut Danamik Dalam (Ihya'ul Ulum, 2009: 129) salah satu aspek dari kegiatan pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta dengan pemberian pendapat atau apabila dipandang perlu rekomendasi.

Pengawasan sangat diperlukan dalam menjalankan produksi demi tercapainya tujuan, dengan pengawasan apabila terjadi kesalahan pemimpin telah mengetahui sejauh mana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para karyawan dan jalan apa yang harus diambil untuk langkah-langkah selanjutnya.

Pengawasan berhubungan cukup erat dengan perencanaan, rencana tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada pengawasan di dalam pelaksanaannya, dengan adanya pengawasan dapat dibandingkan hasil yang sedang dicapai dengan hasil menurut rencana Pengawasan mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka.

3) Apakah penetapan standar pengawasan efektif dalam pelaksanaan program bedah rumah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Fayol dalam Harahap (2011: 10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah di bidang pengawasan dalam membantu Presiden sebagai Administrator

Pemerintahan yang tertinggi dalam mengendalikan administrasi negara. Dengan kata lain, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh badan/organisasi/unit kerja yang volume dan beban kerja atau tugas pokoknya di bidang pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh badan ini terhadap aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan disebut sebagai pengawasan dari luar (ekstern).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Pengawai dan staf Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh menyatakan bahwa : pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya dalam mewujudkan manajemen yang sehat di lingkungan organisasi/unit kerja masing-masing. Pengawasan ini disebut sebagai pengawasan atasan langsung sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan atasan langsung (pengawasan intern). Untuk melaksanakan tugas pengawasan ini setiap atasan langsung dapat melakukannya sendiri dan dapat pula menunjuk sejumlah pembantu, misalnya berupa tim tetap atau berkala.

Tujuan dari pengawasan menurut George Terry (2009) ialah supaya dewan manajemen mendapatkan gambaran keseimbangan kerja diantara unit-unit secara terpadu. Geogre juga mengatakan bahwa pengawasan hanya dapat dilakukan secara efektif apabila didukung oleh perencanaan dan kebijaksanaan

Program bedah rumah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan perumahan Tunas Harapan merupakan upaya peningkatan kemampuan atau daya kelompok sasaran yang kurang berdaya dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah dan lingkungan yang sehat dan aman. Kemudian masyarakat sebagai pemangku kepentingan sekunder atau warga yang diberdayakan maka program pemberdayaan masyarakat perumahan Tunas Harapan merupakan upaya peningkatan kemampuan komunikasi yang telah dimiliki sehingga mampu mengakses dan melaksanakan kegiatan dari program yang akan dilaksanakan berikutnya.

2. Adanya Pengukuran pelaksanaan pekerjaan.

4) Apakah ada pengukuran standar pelaksanaan kerja dalam program bedah rumah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Sujanto, 2019 : 63). Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawas bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi.

Data-data dan informasi ini digunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan

dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat melakukan tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan.

Fayol, Henry (2010 ; 22) mengatakan bahwa: "Control is consist in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrence. It operates in everything peoples, actions." Kontrol terdiri atas memverifikasi apakah semua sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sesuai instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ada.

Efektifitas dari program bedah rumah Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Atas masih perlu ada pembenahan yang harus dilakukan dari pihak penyelenggara. Para penerima sudah memiliki rumah yang layak huni dan sebagainya. Beberapa bentuk dari program bedah rumah ini yang tidak baik dan tidak diperlukan. Ini tidak sampai dengan menyelesaikan aktifitas kerja atau pelaksanaan pekerjaan yang membuat bentuk dari program bedah rumah tersebut sampai dengan sekarang belum bisa digunakan.

Program bedah rumah Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, yaitu berupa fasilitas bahan bangunan atau berupa uang untuk membeli bahan bangunan. Maksud program bantuan stimulan swadaya adalah untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah, membangun rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman.

Sedangkan tujuan program bantuan stimulan perumahan swadaya adalah membangun rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman oleh masyarakat rentan itu sendiri. Lingkup program BSPS meliputi bantuan pembangunan rumah baru, perbaikan total rumah rusak berat, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pembangunan prasarana, sarana utilitas umum lingkungan kumuh, pembangunan utilitas yang melekat pada rumah. Pemerintah atau pemerintah daerah menyelenggaraan kegiatan ini ditujukan untuk kelompok sasaran utama adalah masyarakat miskin

5) Apakah standar pengukuran tersebut memberi manfaat terhadap pelaksanaan pengawasan program bedah rumah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Pengertian pengawasan menurut Heidjarachman dan Husnan (1998: 358) adalah sebagai berikut : “Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan atau penyesuaian kembali rencana yang telah

dibuat.” Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control), pengawasan ini sering disebut “Ya-Tidak”, screening control atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dengan dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” Jika dilihat dari inputnya program bedah rumah ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh penerima bantuan program bedah rumah ini, akan tetapi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jalannya program bedah rumah ini belumlah bagus di mana bentuk dari bantuan program bedah rumah ini masih kasar.

Kelayakan dan kriteria penerima bantuan program bedah rumah serta anggaran yang harus diketahui oleh masyarakat. Program Bedah Rumah ini merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dalam upaya membantu masyarakat yang miskin, memiliki rumah yang tidak layak huni serta bagi warga masyarakat yang belum memiliki rumah atau tempat tinggal. Dalam proses jalannya

program bedah rumah ini masih harus dilakukan pembenahan mekanisme yang tidak baik dan tidak sesuai, dimana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan atau koordinasi antara Hukamtua dengan BPD tidak baik.

- 6) Apakah pengukuran standar sebagai bagian pengawasan program bedah rumah menjadi bahan evaluasi di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil**

Menurut Arifin & Hadi W.43, *controlling* (pengawasan) juga disebut juga sebagai pengendalian, merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, fungsi ini bertujuan untuk memastikan penemuan dan penerapan aktivitas (termasuk cara dan peralatan yang digunakan) di lapangan sesuai dengan yang direncanakan.

Pemimpin harus merumuskan hasil yang akan dicapai secepat mungkin. Tujuan yang dinyatakan secara umum atau kurang jelas seperti pengurangan biaya over head atau meningkatkan pelayanan pelanggan, perlu dirumuskan lebih jelas seperti pengurangan biaya over head dengan 12% atau menyelesaikan setiap keluhan konsumen dalam waktu tiga hari.

Menurut SP Siagian (2008: 115) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung, dapat berupa: inspeksi langsung, pengamatan langsung di tempat, dan membuat laporan di tempat.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa dalam proses jalannya program bedah rumah ini para penerima program bantuan program bedah rumah ini telah memiliki tempat tinggal atau rumah yang telah layak huni, dari hasil wawancara juga para penerima bantuan program bedah rumah ini merasa bahwa tidak layak untuk menerima bantuan program bedah rumah ini, Dalam proses

pemerintah menentukan siapa-siapa penerima bantuan program bedah rumah ini dari hasil penelitian menunjukkan masih kurang bagus dan harus diperhatikan kembali, , untuk itu dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bahwa pemerintah/penyelenggara program bedah rumah ini harus memperjelaskan penerima bantuan program bedah rumah ini untuk kedepan lebih bagus.

3. Adanya Perbandingan pelaksanaan dengan standar.

7) Apakah ada perbandingan pelaksanaan dengan standar dalam program bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Menurut Saydam (2000:20) mengemukakan tujuan pengawasan yaitu: "Terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas, kebijaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh atasan langsung."

Bahwa Program Bedah Rumah perlu dilanjutkan agar masyarakat yang hidupnya kurang beruntung merasa diperhatikan dan dibantu, terutama pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni. Adanya program bedah rumah mendidik warga masyarakat untuk peduli kepada sesama dan belajar beramal karena pada hakekatnya harta yang kita miliki itu sebagian terdapat milik orang lain yang membutuhkan seperti anak yatim dan orang miskin termasuk duafa. Mereka dapat hidup layak seperti umumnya masyarakat Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Direktur Penanganan Fakir Miskin

Wilayah I Nomor 792/6.2/HK.01/11/2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahap XXXV Program Penangan Fakir Miskin Wilayah I Tahun 2021.

Menurut Heidjarachman dan Husnan (1998: 358) adalah sebagai berikut : “Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan atau penyesuaian kembali rencana yang telah dibuat.”

Proses pelaksanaan program bedah rumah telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang- Undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Selanjtunya dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Bedah Rumah merupakan kebutuhan yang wajib sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia.

Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil telah dilaksanakan dengan ketentuan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Dalam hal ini komunikasi atau sosialisasi terhadap Program Bedah Rumah telah dilaksanakan Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil melalui Pemerintahan Desa. Selain itu tentunya komunikasi tersebut dilihat dari kewenangan yang mengatur dan melaksanakan Program Bedah Rumah

Tahun 2021. Selain itu mekanisme pelaksanaan penyelenggara program bedah rumah tahun 2021 menggunakan metode top down.

8) Apakah perbandingan pelaksanaan tersebut memberi dampak terlaksananya pengawasan langsung dalam program bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Di dalam bukunya, Saydam (2000:167) menjelaskan tentang macam-macam pengawasan yang dikenal dalam ilmu manajemen, walaupun sasaran pengawasan tidak terjadi penyimpangan (deviasi) dalam pelaksanaan pekerjaan, tetapi dilihat dari siapa yang melakukan pengawasan itu, maka pengawasan dapat dibedakan atas:

- (a) Pengawasan fungsional. Pengawasan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat fungsional atau aparat pengawasan yang secara fungsional tugasnya memang mengawasi pelaksanaan tugas-tugas.
- (b) Pengawasan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat yang disampaikan baik secara lisan kepada aparat yang berkepentingan, maupun tertulis melalui media cetak, dan sebagainya.
- (c) Pengawasan melekat. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan. Pengawasan ini melekat pada jabatan yang dipangku oleh seorang pimpinan, sehingga pengawasan merupakan kewajiban yang bersifat mutlak, dan harus dilakukan secara terus menerus.

Setiap tipe standar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk hasil yang dapat dihitung. Ini memungkinkan manajer untuk mengkomunikasikan pelaksanaan kerja yang diharapkan kepada para bawahan secara lebih jelas dan tahapan-tahapan lain dalam proses perencanaan dapat ditangani dengan lebih efektif. Standar harus ditetapkan secara akurat dan diterima mereka yang bersangkutan.

Penanganan program bantuan bedah rumah ini terkhusus di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh, telah terbilang cukup baik disetiap tahapnya akan tetapi disamping itu juga terdapat kesenjangan sosial kenyataan tidak sesuai dengan harapan, karena kurang validnya data penduduk miskin dan jumlah data masyarakat yang tidak memiliki hunian yang layak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan peneliiian yang berjudul “Evaluasi Program Bedah Rumah (studi terhadap penerima manfaat bantuan bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh "penelitian ini diperuntukkan untuk meninjau kembali sejauh mana pencapaian terhadap program yang telah dilaksanakan dan bagaimana dampak program bedah rumah terdahap penerima manfaat bantuan bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh

- 9) **Apa kendala dalam perbandingan pelaksanaan dengan standar dalam program bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.**

Berdasarkan data wawancara dan data verifikasi Kementerian Sosial yang telah dilaksanakan, namun ada beberapa kendala yang ditemukan yaitu menyangkut anggaran Rp. 20.000.000./PKM yang dirasakan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan program Bedah Rumah bagi masyarakat. Selanjutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial dan Kepala Desa terhadap Program Bedah Rumah Tahun 2021 telah melaksanakan ketentuan Peraturan.

Menurut Edy Sutrisno (2014) dalam pandangannya tentang kemiskinan bahwa kebutuhan dasar seseorang atau kelompok meliputi banyak kebutuhan seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, pangan, pekerjaan, perumahan, air bersih, sumber daya alam dan kebutuhan dasar lainnya yang menjadi pokok kebutuhan manusia. Jika semua kebutuhan itu terpenuhi, sehingga masyarakat mendapatkan hak dan penyelenggaraan kehidupan sosial.

Dilihat dari hasil wawancara dan tugas yang dilaksanakan dalam Program Bedah Rumah Tahun 2021. Karena kedua lembaga pemerintah tersebut memiliki kewenangan yaitu sebagai lembaga yang memonitoring, pemantauan dan evaluasi kerja yang ada dilapangan terhadap Program Bedah Rumah Tahun 2021. Sehingga pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prinsip pemerintah yang baik (good goverment)

4. Adanya Perbaikan atas penyimpangan

10) Apakah pengawan yang di lakukan ada Upaya perbaikan atas penyimpangan pelaksanaan bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Untuk menjembatangi agar masyarakat dapat hidup layak dan sejahtera serta potensi masyarakat dalam memberikan bantuan yang berdasarkan pada nilai kemanusiaan solidaritas sosial tersebut dengan masyarakat yang mengalami masalah penyandang butuh bantuan, maka diperlukan institusi, sehingga dalam hal ini efektivitas institusi ditentukan oleh dua hal yaitu kepercayaan dan penguasaan jaringan. (Syawei, 2012).

Sebanyak 1.372 Kepala Keluarga Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil penerima terbanyak yaitu 498 Kepala Keluarga. Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil merupakan penerima ketiga terbanyak dari tiap desa yaitu sebanyak 103 Kepala Keluarga.

Masing-masing Kepala Keluarga penerima bantuan mendapatkan bantuan dana Bedah Rumah sebesar enam juta rupiah dan diturunkan melalui dua tahap, tahap pertama berupa uang tunai sebesar tiga juta rupiah yang dicairkan melalui Bank dan tahap kedua yaitu berupa barang/ bahan bangunan yang senilai dengan uang sebesar tiga juta rupiah. Bantuan dana tersebut tersebut sepenuhnya harus digunakan dalam pembangunan rumah penerima bantuan.

Program ini bertujuan member bantuan kemudahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memperoleh akses ke sumber pembiayaan sehingga mendapatkan biaya yang terjangkau untuk membangun rumah sendiri, baik pembagunan baru maupun meningkatkan kualitas rumah.

11) Apakah perbaikan atas penyimpangan tersebut menghasilkan pelaksanaan program bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan

Menurut Edward yang dikutip dari (Khotimah, 2017), beberapa faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu proses implementasi yaitu Pertama, komunikasi yang baik dalam perencanaan suatu program yang dilakukan dengan jelas bagi para pelaksananya. Hal ini menyangkut dari bagaimana proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi yang disampaikan. Kedua, sumber daya hal ini terdiri dari empat komponen yaitu ter- penuhinya jumlah tim pelaksana dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu dapat dilihat seberapa jauh kebutuhan, nilai, serta kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Sebagaimana tujuan dari Program Bedah Rumah adalah upaya pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun rumah layak huni untuk mensejahterakan masyarakat.

Namun disisi lain ternyata program ini juga membuat masyarakat penerima bantuan merasa terbebani. Hal ini disebabkan oleh banyaknya

persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh BAPPEDA yang membuat masyarakat penerima merasa terbebani, salah satu contohnya ialah ketika dana tahap pertama turun berupa uang Rp. 3.000.000 untuk masing-masing kepala keluarga rata-rata hanya cukup untuk membangun pondasi rumah saja. Sedangkan dana tahap kedua akan turun apabila seluruh penerima bantuan telah memasang batu bata atau dinding rumah setinggi 30cm.

Sehingga menimbulkan permasalahan pada masyarakat penerima itu sendiri yang terpaksa mencari/mengeluarkan dana sendiri untuk melengkapi kekurangan persyaratan yang ditentukan oleh BAPPEDA. Bahkan sebagian penerima bantuan melakukan pinjaman dana kepada saudaranya dan ada juga masyarakat melakukan pinjaman pada penjual batu bata dengan melakukan perjanjian pembayaran pada saat dana tahap kedua turun. Namun pada tahap kedua dana turun berupa bahan bangunan yang diambil di salah satu toko bangunan yang telah ditentukan bersama, sehingga masyarakat penerima bantuan harus mengeluarkan dana lagi untuk mengembalikan pinjaman dana yang dilakukan pada saat kekurangan dana dalam membangun rumahnya

12) Apa pandangan bapak terhadap pelaksanaan tersebut pada hal adanya perbaikan atas penyimpangan dalam program bedah rumah di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

William Dunn 2000 bahwa efektivitas adalah suatu kriteria untuk meyeleksi berbagai alternatif yang dijadikan rekomendasi dan

didasarkan pada pertimbangan apakah alternatif yang telah direkomendasikan tersebut memberi hasil atau akibat yang maksimal, terlepas dari pertimbangan efisiensi (Ardi, 2018) sama seperti yang diungkapkan dari William Dunn bahwa efektivitas memberi hasil atau akibat yang maksimal, masyarakat Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil merasakan.

Dana Pelaksanaan Bedah Rumah tersebut dicairkan oleh BAPEDDA Kabupaten Aceh melalui dua kali pencairan dana. Pencairan dana tahap pertama yaitu tiga juta rupiah berupa uang yang dicairkan melalui bank dan pada tahap kedua berupa barang atau bahan bangunan yang senilai dengan uang tiga juta rupiah yang bisa di ambil oleh penerima di took bangunan yang telah ditentukan bersama. Jarak pencairan dana tersebut ialah tiga minggu dari pencairan dana tahap pertama. Besar dana untuk membangun rumah swadaya sebagaimana dimaksud tidak termasuk untuk membayar upah pekerja dan retribusi perijinan

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program bedah rumah/Perumahan Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah pembangunan rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Program Bedah Rumah bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun rumah layak huni untuk mensejahterakan masyarakat
2. Diharapkan kepada pemerintah Indonesia terutama Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dinas Sosial yang

bertanggung jawab atas Program Bedah Rumah atau Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, untuk memperbesar Anggaran dalam program Bedah Rumah atau Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat. Karena dirasakan kurang, dan tentunya berdampak pada pemenuhan rumah layak.

3. Efektifitas Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Program Bedah Rumah yang ada di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Atas belum terlaksana dengan baik dan harus ada perbaikan dari pada program bedah rumah ini dimana dalam proses pengerjaan tidak selesai, anggaran yang disalurkan tidak diketahui masyarakat, mekanisme serta kriteria yang masi kurang baik atau tidak memiliki kejelasan. Dan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD yang tidak baik.

5.2. Saran

1. Dari setiap bentuk yang ada dalam program bedah rumah ini harus di perhatikan dengan baik agar hasilnya halus dan tidak mengecewakan juga anggaran dari program bedah rumah ini harus di ketahui penerima dan masyarakat umumnya serta penyelenggara harus menyesuaikan secara tepat anggaran yang terpakai. Penyelenggara juga harus memperhatikan kriteria dan kelayakan penerima bantuan program bedah rumah serta harus memiliki

kriteria yang khusus yang diketahui masyarakat pada umumnya serta ada Sosialisasi kepada masyarakat. Serta yang terpenting yaitu adanya koordinasi yang baik dari pemerintah sebagai penyelenggara dan BPD agar program bedah rumah ini dapat berjalan dengan baik.

2. Efektifitas dari Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Atas masih perlu ada pembenahan yang harus dilakukan dari pihak penyelenggara.
3. Program Bedah Rumah perlu memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan maka program ini akan tetap sesuai dengan sasaran dan berjalan dengan baik tanpa perdebatan yang berarti, jika di lihat dari definisi Rumah Layak Huni

Daftar Pustaka

- Afifuddin 2012, Pengantar administrasi pembangunan, Bandung: Alfabeta.
- A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds), Manajemen Jilid I, terj. Alexander Sindoro, Jakarta: PT Prahallindo, 1996
- Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Renika Cipta, 2003), hal. 344
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PTRineka Cipta
- David Osborne dan Peter Plastrik, 2000. Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, terj. Abdul Rasyid dan Ramelan, Jakarta: PPM
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Edy Sutrisno, 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetak Ke Enam. Pranada Media Group, Jakarta
- Fayol, Henry. 2010. Manajemen Public Relations. Jakarta: PT Elex Media.
- Gaouzali, Saydam. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia (Suatu Pendekatan Mikro). Jakarta: Djambatan
- Heidjrachman, Ranupandjojo dan Suad Husnan, 2002. Manajemen Personalialia. Edisi IV, Yogyakarta: BPFE.
- Heidjrachman, Ranupandjojo dan Suad Husnan, 2002. Manajemen Personalialia. Edisi IV, Yogyakarta: BPFE
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. Jakarta: Pustaka Setia
- Khotimah, Risfatul. dkk. (2017). Pengaruh Kepemimpinan, Stres Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Produksi di PT Ungaran Sari Garmen. *Journal of Management*, 3(3), 2502-7689.
- Khotimah, Khusnul. (2018), Analisis Program Pada Bantuan Bedah Rumah Layak Huni Terhadap Penentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tesis Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Lexy J. Moleong, (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Puspita Sari, Dwi, 2011, Pengaruh Disiplin dan Pengawasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Karyadeka Alam Lestari Semarang, Skripsi, Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Syawei, M, Suhendi, A. (2012), Pemberdayaan Keluarga Miskin Berbasis Komunitas Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi di Desa Jambu Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat), *Sosiokonsepsia* Vol. 17, No.03.
- Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik, Erlangga, Jakarta
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sujanto, M.A., Raditia Yudistira. (2019). Pengantar Public Relations Di Era 4.0: Teori, Konsep, Dan Praktik Kasus Terkini. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Soeharto, Irawan. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995
- Stoner, James A.F; Freeman, R. Edward; Gilbert JR, Daniel. R, 2005, Manajemen, Jilid I, PT Bhuana Ilmu Populer

- Sondang P, Siagian. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, George R. 2012. Prinsip-Prinsip Manajemen, penerjemah J-Smith D.F.M. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13/PRT/M/201016 tentang Bantuan Stimulan Bantuan Bedah Rumah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jika menyalah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Medan, 12 Juni 2023.

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Reza Akhyar
N P M : 1903100029
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 125 SKS, IP Kumulatif 3,22

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Tunas Harapan kec. Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil	12/6 2023 AAJ
2	Kualitas kinerja pegawai dalam kepemimpinan Domestik di desa Tunas Harapan	
3	Kemampuan kerja pegawai dan kualitas pelayanan publik di desa Tunas Harapan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 - Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 12 Juni 2023.

Ketua

Program Studi Administrasi Publik

Ananda Mahardika, S.Sos, M-SP

(.....)

NIDN:

Pemohon,

REZA AKHYAR

(.....)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi.....

(.....)

NIDN:

PB: AFFAN AL QUDDUS





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghibur, surai itu agar dihiburkan nomor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 1047/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **12 Juni 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **REZA AKHYAR**
 N P M : 1903100024
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA TUNAS HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Pembimbing : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.**

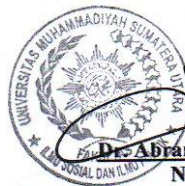
Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 055.19.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 12 Juni 2024.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 01 Dzulhijjah 1444 H
 20 Juni 2023 M

An. Dekan,
 Wakil Dekan - I



Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom.
 NIDN : 01 11 117804



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 ke menaruh surti ke agar deebukan
 oleh dan langganys

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi' No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fkip.umcu.ac.id> fkip@umcu.ac.id fumsmedan umsmedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 17 Juli 2023

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Reza Akhyar
 NPM : 1903100024
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1231/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan judul sebagai berikut :

Fungsi Pengawasan Langsung Dalam Program Bedah
 Rumah Di Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah
 Kabupaten Aceh Singkil

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menverujui:

Pembimbing

(APPAL AL-GUDDUS, S.Sy. M.S.)

NIDN:

Pemohon,

(Reza Akhyar)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1328/UND/13.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 28 Juli 2023
Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Lab FISIP UMSU Gedung C
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



UMSU
Unggul! Cerdas! Berprestasi!



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMBAHING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	REZA AKHYAR	1903100024	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA TUNAS HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
2	FETRY HURANISYA	1903100019	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM PROGRAM KESEHATAN DI KELURAHAN SENTANG KABUPATEN ASAHAN
3	TIKA RIZKI SAFIRA	1903100039	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA DI DESA MARTEBING SERDANG BEDAGAI
4	MHD. AZWIN	1903100011	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKN) DI KABUPATEN BATUBARA
5	TRI NURANI	1803100088	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN OBJEK PARwisata DI KABUPATEN BATU BARA



MOA
Majelis Pengawas
Majelis Pengawas Majelis
Majelis Pengawas Majelis



Mohamad, 99 Muharrap, 1445 H
28 Juli 2023 M
Dekan
(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fisiip.umsu.ac.id fisiip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

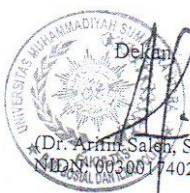
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Sk-5

Nama Lengkap : REZA AKHYAR
 N P M : 1503100024
 Program Studi : Ilmu Administrasi PubliK
 Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan langsung dalam Program becak rumah di desa tunas harapan kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	17/2023 /06	Bimbingan proposal	[Signature]
2	19/2023 /06	Bimbingan proposal	[Signature]
3	27/08/2023	Bimbingan proposal	[Signature]
4	3/07	ACC proposal	[Signature]
5	18/07	Bimbingan skripsi	[Signature]
6	14/08	Bimbingan skripsi	[Signature]
7	15/9	Bimbingan skripsi	[Signature]
8	18/9/23	Acc skripsi	[Signature]

Medan,20.....



Ketua Program Studi, Pembimbing,
 (Anggah Miharadka M. Sos., M.S.P.)
 NIDN: [Signature] NIDN: [Signature]

